



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI SULIYANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 238618

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 202.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/72 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 102.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/70 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 124.000.000

1. MOBIL, NISSAN MARCT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, VARIO NC12AF2CBI Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SE 88 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOTOR, HONDA X1N02O44L0 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.793.100

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.550.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 339.343.100

III. HUTANG Rp. 40.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 299.343.100

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.